

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dwi Putri Cahyawati, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang PTUN*, Jakarta, Gramata Publishing
- I Gede Eka Putra, 2018, *AAUPB sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*“, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , 2003, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Teori Hukum Tata Negara dan Peradilan Administratif*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press,
- Lihat Moh Mahfud MD, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas Satu Tuntutan Administrasi*, dikutip dari SF Marbun,
- Manan, Bagir, 2012, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Bandung
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju
- Olden Bidara, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed)
- Phulipus M Hadjon, dkk, 1999, *Penghantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
- S. F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*“, Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1983, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. Pertama, (Bandung: Alumni, 1983)

-----, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono, 1993, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/OOD dan Masalah Ganti Rugi dalam Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara*“, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum MA RI, Jakarta

Wicipto Setiadi, 1994 *“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Prosedur Pemeriksaan dengan Acara Cepat di PTUN

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024

## **C. Jurnal Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya**

Aldie Novareza, Syarief Makhya, Robi Cahyadi Kurniawan dengan judul *"Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak Dalam Pemilihan Bupati dan*

- Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020.*" Jurnal Pemerintah dan Politik, Vol 8, No. 1, 2023
- Abdul Haris, dengan judul *"Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD."* jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No.3, 2025
- Adji Sitti Laila Salsabila, Gandes Candra kirana, dengan judul *"Analisis Yuridis Sengketa Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Studi Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA 2018)."* Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi, Vol.2, No.1, 2020
- Anik Entriani. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Koleksi Penelitian IAIN Tuhungagung*, Vol. 3, No. 2, 2017
- D.A Harahap, *"Pemilihan Kepala Daerah"*, Mercatoria Vol. 10, No.1, 2017
- Eddy Marekl Leks, FclArb, Pentingnya Unsur Prosedur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Vol 8, No. 4, 4 Juni 2025
- Jurnal Hukum dan Peradilan, *"Peranan AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,"* Vol. X, 2017
- Khusnul Khotimah, Jendro Hadi Wibowo, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, dengan judul *"Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati Oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara."* Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol. 4, No 4, 2022
- Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa."*Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 139-149.
- Mercatoria, *"Pemilihan Kepala Daerah"* Vol. 10, No.1, 2017

#### **D. Internet/Web**

- Penyebab Terjadinya Sengketa, <https://www.detikjateng.com>, diakses jam 16:33 pada tanggal 26 oktober 2025
- Lawan Kotak Kosong Terancam : gugatan Pasangan Hamdan Febri Bergulir di PTTUN Medan, <https://www.acehportal.com>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025
- Armia Fahmi : Kekuatan Militer dibalik Layar Politik Partai Aceh, <https://www.catat.co>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025
- Pengertian Pemilihan Kepala Daerah, <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-Indonesia/>), diakses jam 16:33 pada tanggal 26 oktober 2025
- Armia Fahmi dan Ismail Resmi Hadapi Kotak Kosong di Pilkada Aceh Tamiang 2024, <https://www.tempo.co>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025

KIP Aceh Tamiang Tolak Berkas Pendaftaran Pasangan Hamdan Sati-Febriadi  
<https://www.ajnn.net>, diakses jam 17:50 pada tanggal 24 april 2026

KIP Aceh Tamiang Tolak Pasangan Hamdan Sati <https://www.Serambinews.com>,  
diakses jam 17:53 pada tanggal 24 april 2026

KIP Aceh Tamiang Tolak Bacalon Hamdan Sati-Febriadi  
<https://www.waspada.id/aceh/hamdan-sati-febriadi-daftar-di-kip-aceh-tamiang/>, diakses jam 17:55 pada tanggal 24 april 2026

PTTUN Medan Kabulkan gugatan perkara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh  
Tamiang <https://www.KabarTamiang.com>, diakses jam 09:58 pada tanggal  
29 april 2026

17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya,  
<https://www.Hukumonline.com>, diakses jam 22:12 pada 02 mei 2026